

Sosialisasi Penyelenggaraan Program Pemerintah Imunisasi di Posyandu Tulip Kota Serang

Rila Kusumaningsih*¹, Virna Dwi Rismaryanti², Nayla Salsabila³, Intan Nur
Rahmadiyanti⁴, Bella Natasya Putri⁵, Sukmawati Dewi⁶, Louis Venansius⁷

^{1,2,3,4,5,6}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
*e-mail: rilakusumaningsih26@gmail.com¹

Abstrak

Salah satu kewajiban pemerintah adalah membuat kebijakan atau program untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, salah satunya dalam hal imunisasi. Tingginya angka kematian bayi dan balita di Indonesia membuktikan perlunya andil pemerintah dalam pengawasan program imunisasi. Untuk itu dilakukan penelitian mengenai tingkat efektivitas pemerintah dalam pelaksanaan program imunisasi, dikarenakan program tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mana dalam hal ini harus dimulai dari kesehatan bayi dan balita. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai seberapa efektif program imunisasi yang pemerintah laksanakan. Selain itu, kegiatan penyuluhan juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian berupa metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sumber data diambil dari sumber primer maupun sekunder, dengan diadakannya kuesioner google form dan wawancara semi terstruktur, serta tambahan dari arsip atau dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program imunisasi ini kurang merata, lalu adanya masyarakat yang belum mendapat program imunisasi yang disebabkan oleh penolakan dari orang tua dalam berbagai bentuk. Selain itu, penelitian menunjukkan perlunya partisipasi masyarakat dalam segala program yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya imunisasi. Kegiatan ini pun berhasil mengedukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi.

Kata kunci: Imunisasi, Program Pemerintah, Sosialisasi

Abstract

One of the government's obligations is to create policies or programs to meet public health needs, one of which is immunization. The high death rate of infants and toddlers in Indonesia proves the need for the government's role in monitoring immunization programs. For this reason, research was carried out regarding the level of government effectiveness in implementing the immunization program, because this program has an important role in improving the quality of public health, which in this case must start from the health of infants and toddlers. This activity was carried out with the aim of assessing how effective the government's immunization program is. Apart from that, outreach activities were also carried out as an effort to increase public awareness of the importance of immunization. The method used in the research was a mixed method, namely qualitative and quantitative. Data sources were taken from primary and secondary sources, by holding Google Form questionnaires and semi-structured interviews, as well as additionally from archives or government documents. The research results show that the immunization program is not evenly distributed, and there are people who have not received the immunization program due to rejection from parents in various forms. Apart from that, research shows the need for community participation in all programs implemented by the government, one of which is immunization. This activity was also successful in educating the public about the importance of immunization.

Key words: Government Program, Immunization, Socialization

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sekumpulan individu yang memiliki hak dan kewajiban tertentu untuk menjalankan suatu kekuasaan berdasarkan Undang-undang untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Kewajiban pemerintah tersebut salah satunya adalah memenuhi hak kesehatan masyarakatnya, yang mana hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan secara optimal dari pemerintah. Hal ini merupakan faktor penting dalam mensejahterakan masyarakat (Siburian & Hutahaean, 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu dengan cara menyediakan obat-obatan berupa program imunisasi yang telah diatur oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan jumlah penerima imunisasi, tipe imunisasi ini sesuai dengan kelompok umur serta tata cara memberikan imunisasi kepada masyarakat (Sari & Nurmasari, 2024).

Imunisasi adalah upaya untuk menumbuhkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga mereka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan saat terpapar dengan penyakit tersebut (Perwitasari, 2022). Selain memiliki manfaat, imunisasi juga memiliki efek samping. Imunisasi dapat menyebabkan efek samping yang umum seperti kemerahan, bengkak, dan demam tinggi. Imunisasi di Indonesia pertama kali diberikan pada tahun 1956, dan analisis pelayanan imunisasi rutin pada bayi di bawah umur 1 tahun menunjukkan bahwa beberapa daerah menerima imunisasi dengan baik. Namun, ada beberapa daerah di mana cakupan imunisasi masih rendah. Sehingga perlu upaya khusus untuk melakukannya (Pusparyni et al., 2021).

Pelayanan imunisasi di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dapat diperoleh pada (1) Pusat pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti: Puskesmas, Posyandu, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit atau Rumah Bersalin; (2) Pelayanan di luar gedung. Namun, diselenggarakan oleh pemerintah misalnya pada saat diselenggarakan program bulan imunisasi anak sekolah, pekan imunisasi nasional, atau melalui kunjungan dari rumah ke rumah; (3) Imunisasi rutin juga dapat diperoleh pada bidan praktik swasta, dokter praktik swasta atau rumah sakit swasta (Fitriyani et al., 2020).

Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 130 dan 132 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada semua bayi dan anak. Pasal 132 ayat (3) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Pasal 132 ayat (4) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Wajib adalah peraturan menteri dalam hal ini penolakan gagasan ini berasal dari komitmen negara hukum bahwa negara didirikan atas hukum (Fitriyani et al., 2020).

Turunnya tingkat kesehatan masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan oleh tingginya angka kematian bayi dan balita. Masalah ini menunjukkan perlu adanya andil pemerintah dalam mendukung dan mempertahankan pengawasan program imunisasi (Darmin et al., 2023). Penggalakkan program imunisasi pun diperlukan untuk menekan angka kematian bayi dan balita. Namun pada kenyataannya, program imunisasi ini masih mengalami beberapa hambatan seperti kurang meratanya program imunisasi, dan terdapat penolakan dari orang tua. Anggapan yang salah tentang imunisasi, tingkat pengetahuan yang rendah, dan kesadaran yang kurang terhadap imunisasi ikut andil dalam terjadinya penolakan dari orang tua untuk memberi anaknya imunisasi. Selain itu, ada juga ketakutan dari para ibu akan efek samping yang muncul setelah bayi dan balita diimunisasi (Indah Sari et al., 2024).

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini akan melakukan penyuluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah dalam program imunisasi, serta efektivitas program imunisasi dari pemerintah.

2. METODE

Pada bagian metode penerapan ini, metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada ketidakhadiran penggunaan alat-alat statistik (Ali & Yusof, 2011) sehingga penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasar pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah secara empiris, objektif, terukur, rasional, serta sistematis (Sugiyono, 2021).

Sumber data diambil dari sumber data primer maupun sekunder, yang diperoleh melalui kuesioner *google form* (sumber data primer kuantitatif), wawancara semi terstruktur (sumber data primer kualitatif), serta mendatangi lokasi atau tempat di mana program imunisasi berjalan. Selain itu, ada pula data-data yang diambil dari dokumen dan arsip kementerian kesehatan, serta jurnal dari berbagai penelitian mengenai program imunisasi.

Adapun analisis data untuk bagian metode kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *spreadsheet* untuk menganalisis serta melihat hasil akhir dari data tersebut. Pertama, data di analisis melalui aplikasi *spreadsheet* untuk melihat jawaban dari semua responden yang telah mengisi. Kemudian hasil data akan dianalisis. Untuk metode kualitatif peneliti melakukan pengelompokan data, menyusun jawaban akhir dari responden, dan menyimpulkan tingkat keberhasilan pemerintah serta pemerataan program imunisasi ini.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner *google form* yang telah diisi oleh 50 responden (100%) melalui survey (*google form*), yang mengisi survey ini adalah perwakilan yang diambil secara acak oleh peneliti. Hal tersebut untuk memastikan bahwa survey ini merata keseluruh populasi. Perlu diingat untuk memastikan data yang hilang atau tertinggal tidak akan memiliki pengaruh pada penentuan data, karena tingkat responden cukup tinggi. Juga dilakukan wawancara sedikit terkait dengan program imunisasi di tempat atau lokasi yang didatangi. Sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen atau arsip pemerintah, serta jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan program imunisasi melalui *google scholar* ataupun *software* lainnya yang mendukung.

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Tahap awal ini menyusun tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Untuk persiapan penyuluhan diawali dengan mengurus surat pengajuan izin dari Puskesmas Serang. Kemudian mempersiapkan materi seputar imunisasi kepada ibu dan anak yang dilakukan di Posyandu Tulip, Ciceri, Kota Serang, Banten pada tanggal 7 Maret 2024 di jam 09.00 WIB. Kemudian mempersiapkan alat dokumentasi dan makanan ringan seperti susu dan roti. Selanjutnya mempersiapkan pengumpulan data diawali dengan membuat kuesioner *google form* untuk mengambil data seputar imunisasi dengan membagikan tautan *google form* <https://forms.gle/usNU69XPc75kHKzF9> melalui bantuan teman untuk memulai pengisian *google form* tersebut. Subjek penelitiannya merupakan orang tua yang saat itu hadir ketika penyuluhan, mereka juga sekaligus menjadi target peserta dari kegiatan masyarakat yang dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memberikan informasi kepada individu atau kelompok yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorongnya partisipasi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui program-program ini masyarakat dapat berperan aktif dan berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Dinas Sosial, 2022).

Penyuluhan masyarakat ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan pemerintah dalam pemerataan program imunisasi. Imunisasi merupakan suatu program pemerintah yang memiliki peran penting terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Imunisasi yang terpenuhi dengan baik akan memberi dampak yang baik tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat luas, karena dengan semakin banyaknya orang/individu yang diimunisasi, maka akan tercipta kekebalan kelompok yang semakin kuat. Penyuluhan masyarakat mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mendapatkan program imunisasi secara merata, banyak dari mereka yang masih harus membayar untuk mengimunisasi anak-anaknya yang mana sebetulnya imunisasi seharusnya bisa didapatkan gratis, terutama untuk vaksin-vaksin yang sudah menjadi imunisasi rutin. Penyuluhan masyarakat ini sejalan dengan laporan Kemenkes (2023) yang menyatakan bahwa memang cakupan imunisasi yang sudah meningkat sejak 2019 lalu, namun masih belum cukup. Hal ini dikarenakan setidaknya terdapat 5% atau sekitar 240.000 anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap (Tim Humas P2P, 2023).

Data hasil penyebaran survey melalui *google form* dapat disajikan pada berikut.

3.1. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Program Imunisasi

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif persepsi masyarakat tentang kebutuhan program imunisasi di Kota Serang.

Tabel 1. Kebutuhan imunisasi

No	Tingkat Keberhasilan	Frekuensi	Persentase
1	Iya	50	100%
2	Tidak	0	0%
Total		50	100%

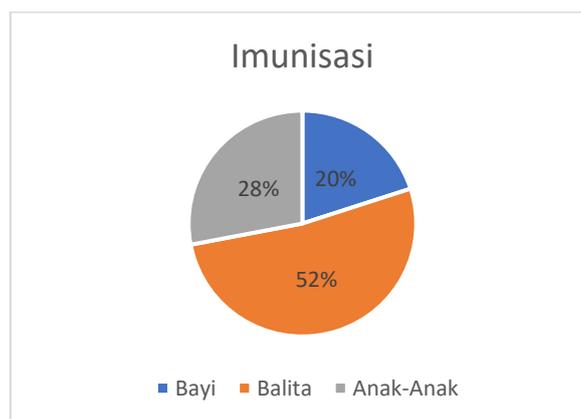
Terkait dengan kebutuhan imunisasi di masyarakat, sudah tercapai 100%, yang berarti dari pencapaian kebutuhan imunisasi sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini menggambarkan kebutuhan imunisasi sudah terlaksanakan dengan sangat baik kepada masyarakat sehingga tercapainya kepuasan masyarakat terhadap kebutuhan imunisasi.

3.1.1. Data Hasil Penyuluhan

Diagram 1 menunjukkan jumlah orang yang diimunisasi di Posyandu Tulip, Kota Serang, Banten.



Gambar 1. Foto bersama masyarakat di Posyandu Tulip



Gambar 2. Jumlah yang diimunisasi di Posyandu Tulip

Hasil dari kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan terkait imunisasi menghasilkan 25 orang (100%), yang terdiri dari bayi 20%, anak-anak 28%, balita 52% yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan program pemerintah yaitu imunisasi. Hal ini dibuktikan dengan orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya imunisasi terhadap kekebalan tubuh para bayi, balita, serta anak-anak. Hal ini membuktikan juga bahwa imunisasi sangat diperlukan untuk menjaga kekebalan tubuh.

3.2. Keberhasilan Pemerintah dalam Melaksanakan Program Imunisasi

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif persepsi masyarakat tentang keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program imunisasi di Kota Serang.

Tabel 2. Tingkat keberhasilan pemerintah

No	Tingkat Keberhasilan	Frekuensi	Persentase
1	Berhasil	45	90%
2	Tidak Berhasil	5	10%
Total		50	100%

Tingkat keberhasilan program imunisasi dari pemerintah sudah mencapai 90%, yang berarti program sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum terpenuhi. Akan tetapi masih ada 10% sisanya dari 90% masih belum adanya pemerataan yang menyeluruh sampai 100%. Hal ini berarti program yang ada sudah berjalan cukup baik.

3.3 Data Hasil Kuesioner

Untuk menggali data yang lebih dalam tentang kebutuhan dan keberhasilan pemerintah terkait program imunisasi yang diharapkan oleh masyarakat, kuesioner telah diisi oleh 50 responden (masyarakat) yang hasilnya telah disimpulkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Data hasil wawancara

Subjek	Alasan Tingkat Keberhasilan Pemerintah	Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Imunisasi	Faktor Terbesar Dalam Pelaksanaan Imunisasi	Harapan Untuk Pemerintah Dalam Keberlanjutan Imunisasi
Subjek 1	Mengalami penurunan daya tahan tubuh/imunitas sehingga anak-anak tersebut akan lebih rentan terserang penyakit-penyakit yang sebetulnya bisa dicegah melalui imunisasi ini. Penyakit-penyakit tersebut seperti campak, polio, tetanus, hepapatis b, dan lain-lain sebagainya. Jika tidak rutin/hanya mendapat vaksin sekali saja masih bisa berpotensi terserang penyakit-penyakit ini, maka yang tidak pernah sama sekali akan memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk terserang penyakit.	Program imunisasi sudah berhasil dijalankan oleh pemerintah, karena dilingkungan sekitar program ini telah dijalankan tiap bulannya. Selain itu dapat dilihat dari adanya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tindakan pencegahan melalui pemberian imunisasi secara rutin dan lengkap untuk anak.	Responden lebih dari 60% menjawab faktor orang tua lah yang memicu apakah anak diperbolehkan imunisasi atau tidak. Banyak anak yang tidak diizinkan untuk imunisasi karena pemikiran orang tuanya. Responden mengeluh akan kesadaran orang tua yang menghambat imunisasi ini. Terbatasnya pengetahuan orang tua akan pentingnya imunisasi. Orang tua disini juga membandingkan anak pada jaman dahulu dengan jaman sekarang, yang menjelaskan bahwa anak jaman dulu walaupun tidak di imunisasi tetapi tumbuh sehat.	Harapannya pemerintah bisa memperluas kebijakan program imunisasi.
Subjek 2	(jawaban sama dengan subjek 1)	Karena masih banyak di daerah - daerah yang jauh dari kota kurang mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya imunisasi anak. Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan juga sangat mempengaruhi kenapa pelaksanaan imunisasi ini belum berjalan dengan baik (merata).	(jawaban sama dengan subjek 1)	Harapannya pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat sekitar yang belum mendapatkan imunisasi secara gratis.

Hasil dari penyuluhan masyarakat ini menjelaskan bahwa imunisasi sangat berguna bagi semua masyarakat karena memiliki peran penting bagi kekebalan tubuh. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang sudah melakukan imunisasi. Sebagai contoh, masyarakat memiliki suatu kebutuhan untuk menjaga kekebalan tubuh sehingga dengan adanya imunisasi masyarakat dapat menjaga kekebalan tubuh menjadi lebih baik. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa seluruh masyarakat mewajibkan adanya program imunisasi. Mereka menyatakan bahwa imunisasi wajib dilakukan demi menjaga kekebalan tubuh. Misalnya, subjek 1 dan 2 mengatakan bahwa anak-anak yang tidak diimunisasi lebih rentan terserang berbagai penyakit karena menurut mereka anak-anak yang mendapatkan vaksin dengan tidak rutin atau sekali saja masih berpotensi terserang penyakit apalagi yang tidak pernah sama sekali. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pemerintah dapat memperluas kebijakan program imunisasi. Penyuluhan masyarakat ini juga menemukan bahwa imunisasi dapat mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, hasilnya menunjukkan bahwa program imunisasi yang dijalankan pemerintah belum menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan pemerintah dalam program ini belum 100% berhasil. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam program imunisasi ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat belum merasa puas akan program ini, masyarakat menjelaskan bahwa tidak semua wilayah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, dan masyarakat mengaku bahwa mereka tidak menerima informasi yang jelas seputar imunisasi ini. Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa imunisasi ini berbahaya bagi anak mereka. Maka dari itu, masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat meratakan dan memperbaiki program imunisasi ini secara menyeluruh, dan masyarakat mengharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi mengenai program imunisasi ini agar tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan bahwa imunisasi ini membahayakan tubuh.

Adapun 60% responden menjawab bahwa imunisasi dipengaruhi adanya faktor orang tua. Karena orang tua takut akan efek samping yang terjadi pada anaknya ketika imunisasi, sehingga banyak anak yang tidak diizinkan imunisasi. Sebagai contoh anak diwajibkan untuk imunisasi di puskesmas atau lembaga kesehatan, tetapi dari pihak orang tua menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi mendetail mengenai imunisasi, mereka berpikir bahwa imunisasi ini berbayar. Yang seharusnya imunisasi yang dijalankan oleh puskesmas, posyandu atau instansi kesehatan pemerintah menjalankan program ini gratis dan tidak di pungut biaya sepeser pun. Mereka menyarankan harusnya pemerintah memberikan informasi tentang imunisasi lebih banyak lagi, melalui media sosial dan media cetak. Hasil penyuluhan masyarakat ini juga menunjukkan bahwa tidak sedikit juga anak yang tidak diimunisasi. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan pendekatan kepada orang tua mengenai program imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah sehingga orang tua bisa lebih percaya dengan program imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah.

Hasil penyuluhan masyarakat ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah imunisasi di Kota Serang, Banten masih belum terwujud sepenuhnya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar pemerintah bisa lebih memperhatikan masyarakatnya ketika membuat suatu program, terutama jika hasil dari program tersebut akan dirasakan oleh orang banyak. Pemerintah bisa lebih meninjau daerah mana yang kurang mendapatkan akses ke sarana prasarana yang akan menunjang keberhasilan program, seperti ketersediaan fasilitas, alat elektronik yang canggih, bahkan dibutuhkannya sumber daya manusia yang profesional. Pemerintah juga diharapkan untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa program imunisasi merupakan suatu hal penting dalam kehidupan karena berkaitan dengan kesehatan. Dengan demikian, tujuan dari efektivitas program pemerintah yaitu imunisasi ini akan tercapai.

4. KESIMPULAN

Penyuluhan masyarakat dilakukan di Posyandu Tulip, Ciceri, Kota Serang, Banten pada 7 Maret 2024. Perluasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan masyarakat ini berkaitan dengan efektivitas pemerintah dalam menyelenggarakan program imunisasi. Penyuluhan masyarakat menunjukkan masih ada masyarakat yang tidak konsisten mendapatkan program imunisasi, dikarekanakan penyebaran program imunisasi masih belum merata, dan masih adanya penolakan dari orang tua dalam berbagai bentuk. Selain itu, penyuluhan masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan atau upaya yang berkaitan dengan masyarakat tidak akan berhasil jika masyarakat tidak berpartisipasi. Hal ini juga berlaku pada program imunisasi yang sedang berjalan.

Setelah melakukan penyuluhan di masyarakat, harapan terbesarnya adalah pemerintah dapat memperluas cakupan imunsasi hingga ke daerah terpencil di Indonesia dan memastikan semua mendapatkan haknya yaitu imunisasi. Dengan demikian, program pemerintah di bidang kesehatan yaitu imunisasi dapat terlaksana dengan baik dan merata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Puskesmas Kota Serang yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Terima kasih kepada Posyandu Tulip yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk menyelesaikan tugas mata kuliah HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. Terima kasih juga kepada seluruh anggota kelompok 5 (Hukum Administrasi Negara, Imunisasi) yang telah memberi dukungan finansial terhadap penyuluhan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Md., & Yusof, H. (2011). Quality in Qualitative Studies: The Case of Validity, Reliability and Generalizability. *Issues in Social and Environmental Accounting*, 5(1), 25–64.
- Darmin, Rumaf, F., Ningsih, S. R., Mongilong, R., Goma, M. A. D., & Anggaria, A. Della. (2023). Pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi dan Balita. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAPALUS*, 1(2), 17.
- Dinas Sosial. (2022). *Penyuluhan Sosial Sebuah Strategi Membangun Komunikasi Informasi Motivasi Edukasi*. Dinas Sosial Kota Magelang.
- Fitriyani, A., Sutrisno, E., & Waluyadi, W. (2020). Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 515–530. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.14620>
- Indah Sari, F., Cisella, D., Afrika, E., & Kebidanan dan Keperawatan, F. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi di Puskesmas Srikaton Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Obsgin*, 16(1), 63–71.
- Perwitasari, T. (2022). Edukasi tentang Pemberian Imunisasi DPT di Posyandu Penyengat Rendah Wilayah Kerja Puskesmas Aur Duri Kota Jambi. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.36565/jak.v4i1.199>
- Puspariny, C., Desi, K., & Ayu, G. (2021). PENGARUH PEMBERIAN IMUNISASI DPT TERHADAP KENAIKAN SUHU TUBUH BAYI DI PUSKESMAS PURBOLINGGO LAMPUNG. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(2), 292–297.
- Sari, T. W., & Nurmasari. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM IMUNISASI VAKSIN MEASLES RUBELLA (MR) DI KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU. *Jurnal Kemunting*, 5(1), 105–107.

- Siburian, K., & Hutahaean, O. P. (2022). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 01(01), 25–34. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.386>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Tim Humas P2P. (2023). *Pada Momentum PID 2023, Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap Capai 94,9 Persen*.